

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



JL. Beringin II No.35 Telp.(0721) 481301 TelukBetung 35222
Email : bkd.lampungprov@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2024 ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu saran / pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan sehingga ke depan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat lebih sempurna lagi.

Bandar Lampung,

2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



MEIRY HARIKA SARI, S.STP.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19770505 199712 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2022.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah	6
2.2. Analisis kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah	29
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan	40
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	42
3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah	43
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	51
4.1. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah.....	51
4.2. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah.....	52
BAB V Penutup	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Awal RENJA Perangkat Daerah sebagai dokumen

perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Awal RENJA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKD Provinsi Lampung harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan RENJA SKPD adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung
- 9) Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;
- 11) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 disusun untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang kepegawaian Provinsi Lampung dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2024.

2. Tujuan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara

(PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Dokumen Rencana Awal RENJA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Dokumen Renja

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian daerah

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan , yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung. Program dan Kegiatan diampu oleh empat bidang, dan satu sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2022 terdiri dari 2 program dan 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 8 sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 6. Penyediaan Bahan/Material
 - 7. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Kepegawaian Daerah
 - a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari 5 sub kegiatan :
 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 3. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 5. Pengelolaan Data Kepegawaian

- b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
 - 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - 2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 3. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2. Pembinaan Disiplin ASN
- d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 3. Pengelolaan Promosi ASN

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki 2 Program, 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Berikut Program Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang berisikan Realisasi anggaran dan Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program penunjang suatu perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana pelayanan di bidang kepegawaian dengan pagu anggaran Rp. 16.691.164.980,- dan terealisasi sebesar 95.57% dan dengan indikator kinerja program adalah Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.40% yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.61% dengan target 13 dokumen yang telah tersusun.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capain realisasi anggaran sebesar 99.19% dengan target 9 dokumen yang telah terevaluasi.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan target kinerja yaitu terbayarnya gaji PNS dan tunjangan PNS BKD Provinsi Lampung dan realisasi anggaran sebesar 96.08%

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran target kinerja 6 dokumen yang terdiri dari 2 laporan fungsional, 2 neraca, 2 BKU, dengan total kinerja 24 dokumen yang telah tersusun sampai dengan akhir tahun dan capaian realisasi anggaran 99.99%

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor

dengan target kinerja 33 buah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (lampu), sehingga realisasi anggaran dari sebesar 100%.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 94.92%.

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi anggaran 100% yang terdiri dari pembelian keset, tissue, sapu ijuk, kemoceng, kotak sampah, lap pel.

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan dengan target kinerja penjiilidan dan cetak, sehingga realisasi anggarannya sebesar 100%.

e) Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Tulis Kantor sebagai sarana penunjang perkantoran yang terdiri dari pembelian ATK dan materai, sehingga realisasi anggaran 100%

f) Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan dengan

terlaksananya rapat – rapat dalam maupun luar sehingga realisasi anggaran dari tahun 2022 sebesar 99.73%

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan terlaksananya perjalanan dinas dalam maupun luar kota sehingga realisasi anggaran 99.97%

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target kinerja 12 bulan terbayarkannya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai sarana rutinitas perkantoran. Terdapat selisih anggaran yang disebabkan karena Awalnya BKD ingin menggunakan gedung exs Korpri untuk UPT Assesment Center akan tetapi hingga saat ini UPT tersebut belum berjalan, sehingga pagu yang digunakan untuk oprasional 2 gedung hanya terpakai 1 gedung. Jadi jumlah capaian realisasi anggaran hanya 48.23%

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor dengan terbayarnya honorarium PTHL dan honor operator perencanaan/keuangan sehingga capaian realisasi anggaran 100%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit kendaraan dinas perkantoran yang terawat dan diperlihara dengan target kinerja 12 unit pemeliharaan kendaraan dinas sehingga realisasi anggaran 86.56%

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang terawat dan terpelihara dengan terawatnya pemeliharaan AC, unit komputer dan pemeliharaan servis penyedot air sebagai penunjang urusan rutinitas perkantoran, sehingga realisasi anggaran 99.79%

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi anggaran 99.53%

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah merupakan program utama dalam rangka pencapaian sasarannya yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dengan pagu anggaran Rp. 9.645.128.573,- terealisasi sebesar 89.66%. Indikator kinerja program adalah Persentase administrasi kepegawaian yang ditingkatkan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL yang terbayarkan dengan dengan capaian realisasi anggaran 89.46%. Berikut realisasi fisiknya antara lain:

Pengadaan ASN Tahun 2022

No	ASN	Alokasi Formasi	Jumlah Formasi	Peserta	Lulus	Keterangan
1.	PPPK	Tenaga pendidikan	277	2.267	257	Pelaksanaan Dinas Pendidikan
2.	CPNS	Tenaga Kesehatan	102	2.392	92	Kepgub Lampung No. G/326/VI.04/Hk/2022 tentang Penetapan Kebu tuhan ASN TA.2022
		Tenaga Teknis (CPNS)	50	1.067	48	
		Total	427		397	

Pengurusan Administrasi PNS

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u>	
	-Kartu pegawai	4 orang
	-Kartu suami	82 orang
	-Kartu istri	8 orang
2.	<u>Pengadaan mutasi pegawai</u>	
	-Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah	2 orang
	-Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat	12 orang
	-Penugasan/Penarikan/Pengembalian Pegawai DPK	14 orang
3.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u>	
	-CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	

b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan (BUP) dengan capaian realisasi anggaran 99.37%.

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun Tahun 2022

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	501
Janda/Duda	27
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	4
Masa Persiapan Pensiun	-
Tewas	-

c) Fasilitas Lembaga Profesi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI dengan capaian realisasi anggaran 99.09% terdapat selisih anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, dan dilaksanakan secara virtual.

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Phurna Bhakti	Terlaksana
2.	Hut Provinsi	Terlaksana
3.	Hut Korpri	Terlaksana
4.	Bapor dan Imtaq Korpri	Terlaksana
5.	Lembaga Bantuan Hukum Korpri	Terlaksana

d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat, dan

pengembangan Sistem Berbasis Android dengan capaian realisasi anggaran 100% dan target kinerja 51 data (Cetak dan jilid buku saku kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung) .

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	96 buku
2.	Buku saku besar	96 buku
3.	BukuPenjagaan KGB	12 buku
4.	Buku daftar urut kepangkatan	2 buku

e) Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat dengan capaian realisasi anggaran 99.82%. dengan target kinerja 15.000 dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang dapat diakuratkan.

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3500 dokumen	Triwulan I
2.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3500 dokumen	Triwulan II
3.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3500 dokumen	Triwulan III
4.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	4500 dokumen	Triwulan IV

b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan

Pembinaan jabatan fungsional yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti Uji kompetensi dengan capaian realisasi anggaran 89.68% terdapat selisih anggaran dikarenakan adanya sisa sewa hotel untuk pelaksanaan ujikompetensi.

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Pelaksanaan Uji Kompetensi	125 orang

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis Fungsional
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	3 orang	34 orang	47 orang	84 orang	244 orang	82 orang

b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta Praja IPDN yang terbina dan PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dengan capaian realisasi anggaran 96.50% dan realisasi fisiknya yaitu terlaksananya pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, serta terlaksananya proses pengantaran Praja IPDN.

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tahun 2022

Ujian Dinas	2022
Tingkat I	186
Tingkat II	8

PNS yang mengikuti UPKP Tahun 2022

No.	Variabel	Lulus
1.	Basis S-2	32
2.	Basis S-1	43
3.	Basis D3	1
4.	Basis SMA	1
5.	Basis SMP	-

IPDN yang dinyatakan lulus Tahun 2022

Fasilitasi Pengantaran Praja IPDN
36 orang

**PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar
Tahun 2022**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	1 orang
2.	Strata 3 (S3)	-

c) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional dengan

capaian realisasi anggaran 80.66% terdapat selisih anggaran dikarenakan adanya kegiatan pelantikan yang tidak terlaksana

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2022

	Tingkatan	Jumlah
SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	93
	Pengangkatan kembali	8
	Pemberhentian dari jabatan	17
	Pemberhentian dan pengangkatan dalam dan dari jabatan fungsional pejabat fungsional hasil penyetaraan	84

c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dengan Indikator kinerja Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, monitoring evaluasi kinerja di PD dan sekolah - sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan capaian realisasi anggaran 91.84% dengan hasil kinerja evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

▪ **Pemberian Penghargaan SLKS di Tahun 2022**

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	157
XX	119
X	483

b) Pembinaan Disiplin ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji dengan dengan capaian realisasi anggaran 92.27% .

Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan Tahun 2022

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	6 orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	6 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	9 orang
JUMLAH		21 orang

Pelaksanaan Pelantikan Sumpah Janji PNS

NO	Jumlah	Keterangan
1.	415 orang	Langsung

d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN Lampung yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Pengelolaan Mutasi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS dengan dengan capaian realisasi anggaran 99.88%.

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	57
Prov Lampung ke.kab/kota	12
Kab/kota ke.Provinsi lampung	20
Antar kab/kota di Provinsi lampung	168
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	257

b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat Periode April/Oktober dan Surat SK Kenaikan Gaji Berkala dengan capaian realisasi anggaran 100%.

Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2022

Bulan	2022
April	1.401
Oktober	1.036

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2022

Golongan	Jumlah
I	22
II	764
III	3.226
IV	1.481
Total	5.493

c) Pengelolaan Promosi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dengan capaian realisasi anggaran 78.48% terdapat selisih anggaran dikarenakan jumlah peserta pada pelaksanaan ujikompetensi PPTP lebih rendah dari yang ditargetkan

Pelantikan Pejabat Tahun 2022

Esselon/Pejabat	Jumlah
II (JPTP)	9
III (Administrator)	40
IV (Pengawas)	41
Total	90

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Keterangan
1.	Uji Kompetensi	20 s/d 28 Mei 2022	42 Pejabat PTP	Dalam rangka mutasi mengisi jabatan yang lowong

2.	Seleksi Terbuka	30 Oktober s/d 21 November 2022	Pelamar Seleksi terbuka yang memenuhi syarat 77 orang	Terdapat 9 JPTP yang lowong, namun pada tahap akhir hanya terdapat 2 JPTP yang terisi
----	-----------------	---------------------------------	---	---

Pencapaian hasil terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 rincian capaian fisk sebesar 91.95 % dan realisasi keuangan sebesar 88.38 %. Berdasarkan pada capaian realisasi fisik dari kegiatan selama tahun 2020, berikut kegiatan yang telah mencapai realisasi fisik diatas 90% sampai dengan 100% adalah kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan Bahan/Material
12. Fasilitasi Kunjungan Tamu

13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
18. Pengelolaan Data Kepegawaian
19. Pengelolaan Mutasi ASN
20. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
21. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
22. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
23. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
24. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
25. Pembinaan Disiplin ASN

Adapun sub kegiatan yang belum mencapai target yaitu sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
4. Pengelolaan Promosi ASN
5. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
6. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Sub-sub kegiatan diatas yang belum mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu antara lain :

1. Awalnya BKD ingin menggunakan gedung eks Korpri untuk UPT Assesment Center akan tetapi hingga saat ini UPT tersebut belum berjalan, sehingga pagu yang digunakan untuk oprasional 2 gedung hanya terpakai 1 gedung
2. Kegiatan pengadaan CPNS tidak ada/tidak terlaksana di Tahun 2022
3. Jumlah peserta pada pelaksanaan uji kompetensi PPTP lebih rendah dari yang ditargetkan
4. Sisa sewa hotel untuk pelaksanaan ujikompetensi
5. Pada Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional ada kegiatan yang belum terlaksana

Hal tersebut tentu berdampak terhadap tujuan Renstra BKD Provinsi Lampung yaitu Mewujudkan Profesionalisme ASN Provinsi Lampung dengan dua sasaran antara lain :

1. Penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan Kompetensi
Mewujudkan Profesionalisme ASN dengan sasaran penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan Kompetensi ASN, hanya saja saat ini pelaksanaan Assesment Center di Provinsi Lampung belum maksimal dikarenakan belum adanya regulasi Internal terkait Manajemen ASN. Peningkatan kembali kualitas pelayanan public
2. Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
Mewujudkan Profesionalisme ASN dengan sasaran penempatan Peningkatan pelayanan berbasis elektronik akan terus di tingkatkan setiap tahunnya.

Pada Tahun 2022 target Kinerja sasaran Pertama sebesar 70% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan 70.30%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil. Pada sasaran kedua target kinerja sebesar 79% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan sebesar 70.83%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil.

Capaian Kinerja Sasaran Renstra Triwulan IV Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi
1	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai dengan kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	70 %	70.30 %
2	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai yang berkualitas	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	79 %	70.83 %

Berikut akan disajikan berbentuk tabel yaitu Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2022, **(Tabel T-C.29, *terlampir*)**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung Nomor : 000.8.6.3/3728/VI.04/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor B/175/AA.05/2024, tanggal 03 September 2024, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dan hasil Tim Evakuator bahwasanya perlu mengubah Indikator Kinerja Utama (IKU) guna untuk acuan kinerja yang lebih terukur dan lebih baik lagi serta menjadi salah satu faktor penunjang Indikator Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, memiliki keterkaitan dengan Misi-7RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yaitu pada Misi ke-7 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan Sasaran RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 Yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKD Provisni Lampung

Visi (RPJPD) :		LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2025		
Misike-7 (RPJPD) :		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Targettt Kinerja	
			2025	2026
1	2	3	4	5
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi Provinsi Lampung yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu. Atas dasar Visi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025.

Selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJPD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 2 (dua) tahunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2(dua)tahun terakhir,sebagai berikut:

“Meningkatnya Manajemen ASN”

Pernyataan Tujuan jangka Panjang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Memetakan setiap pegawai kedalam kotak talenta berdasarkan kualifikasi kinerja dan kompetensinya;
2. Implementasi peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah. Mengacu pada hal tersebut maka sasaran yang hendak dicapai Badan Kepegawaian Dearah Provinsi Lampung adalah :

“Terlaksananya Implementasi 8 Aspek Sistem Merit”

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 beserta

Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung**

Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUNAN/ SASARAN PADA TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Manajemen ASN	Terlaksananya Implementasi 8 Aspek Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	%	295	306

Pada Tabel 2.2 tergambar bahwa besaran target untuk indikator Persentase Peningkatan Indeks Sistem Merit pada tahun 2025 ke tahun 2026 sebesar 11% hal tersebut dapat diukur dari 8 aspek penilaian yang ditetapkan dalam aturan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara D Lingkungan Instansi Pemerintah.

**ROAD MAP RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

2019	2020	2022	2022	2023	2024
1. SIMPEDU 2. E-KINERJA 2. SAPKT (Pengenalan dan Uji Coba) : • e-KGB • e-Pensiun • e-Cuti • e-SLKS • e-Formasi JFT • e-Formasi JFU	1. Sentralisasi Server (KOMINFOTIK) 2. Implementasi SAPKT 3. Pengembangan Aplikasi e-Kinerja berbasis Android (SIKAP) 4. Pengembangan Aplikasi e-Dokumen 5. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT • e-Tugas Belajar • e-Ijin Belajar • e-Pangkat 6. Sosialisasi Aplikasi e-Dokumen dan SAPKT (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB)	1. Pembangunan Aplikasi Seleksi Terbuka JPT 2. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT e-KARIS/KARSU e-KARPEG e-Konversi NIP 3. Peremajaan e-Dokumen PNS pada seluruh OPD 4. Ujicoba Tanda Tangan Digital pada Surat Kenaikan Gaji Berkala 5. Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat)	1. Integrasi Database SIMPEDU dan Database SAPK BKN (Satu Data) 2. Pengembangan SIMPEDU • Back-End Process (Database SAPK) • Front-End Process 3. Pengembangan SAPKT • Back-End Process (Koneksi dengan Database SAPK) • Front-End Process 3. Pembangunan Dashboard Data Kepegawaian • EIS (Executive Information System) • Anjungan Data Kepegawaian 4. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)	1. Re-Design Website BKD Provinsi Lampung. 2. Rencana PUPNSD (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Daerah) Provinsi Lampung. 3. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan) 4. Pengembangan Aplikasi SAPKT dengan Penambahan Layanan Berbasis Aplikasi (Aplikasi Talent Pool dalam rangka pembentukan Assesment Center)	1. Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB) 2. Seluruh Pelayanan dan Informasi Berbasis Elektronik

- Pink : sudah dilaksanakan
- Hijau : akan dilaksanakan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Lampung dalam menjabarkan kebijakan nasional khususnya yang menyangkut dengan pembangunan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang baik, telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan pendayagunaan aparatur sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik wilayah dan konflik sektoral demi terwujudnya pembangunan daerah Lampung yang serasi dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Dalam upaya menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung, BKD Provinsi Lampung menempuh isu – isu strategis, isu – isu strategi tersebut antara lain :

- a. Isu strategis secara umum yang dihadapi BKD Provinsi Lampung antara lain :
 - 1) Pemetaan pegawai di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan kebutuhan Anjab/ABK yang ditetapkan oleh peraturan Gubernur No.G/437/B.59/HK/2018 tetapi baru sesuai kualifikasi jenjang pendidikan belum sepenuhnya penempatan ASN berdasarkan kompetensi;
 - 2) Peningkatan kembali kualitas pelayanan kepegawaian terutama pelayanan bersifat *online*;

- 3) Penyesuaian Sistem Kerja sesuai Permen Pan & RB No.7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- 4) Manajemen Pengelolaan Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 5) Agenda Kerja Utama Gubernur Lampung/Wakil Gubernur Lampung Dan Perangkat Daerah Pengampu Ke 6 yaitu Meningkatkan Efektivitas Pemerintah, Melalui System Perjenjangan Karir Berbasis Kinerja Dan Kompetensi (*Job Fit Assessment*) Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Permasalahan dan Hambatan

1. Akurasi Pemetaan Pegawai Sesuai Kebutuhan
2. Masih terdapat Penempatan ASN Belum sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensinya
3. Pemetaan kompetensi pegawai belum maksimal
4. Belum maksimalnya pengembangan kompetensi pegawai
5. Layanan Kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi
6. Ketidakselarasan antara Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Peraturan Gubernur Lampung No.59 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta. Tata Kerja Perangkat Daerah sehingga berdampak kepada penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

c. Tantangan dan Peluang

1. *Mismatch* antara kebutuhan spesifikasi jabatan dan kualifikasi PNS;
2. Sistem penjenjangan karier melalui *fit and propertes (Assesment Center)* berbasis kompetensi;
3. Peningkatan kemampuan SDM di era 4.0 berbasis *Digital system*;
4. Kebutuhan sarpras (hardware/software) untuk peningkatan otomatisasi pelayanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi, *real time* dan *paperless*;
5. Pemanfaatan teknologi informasi beserta pemeliharaan keamanannya dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien
6. Penyesuaian Manajemen Pengelolaan Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

d. Isu-isu yang di tindak lanjuti ke dalam program kegiatan

Dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya BKD sebagai fungsi penunjang kepegawaian perlu melaksanakan pendistribusian pegawai dalam jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki.

1. Pembentukan *Assesment Center* dalam mengelola pengembangan kompetensi ASN serta sebagai sarana peningkatan Penilaian Sistem Merit KASN dan penempatan ASN berdasarkan kinerja dan kompetensi
2. Penyesuaian Sistem Kerja sesuai Permen Pan & RB No.7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
3. Peningkatan kembali kualitas pelayanan public dengan menambah pelayanan berbasis Aplikasi
4. Pengembangan Aplikasi SAPKT dengan Penambahan Layanan Berbasis Aplikasi (Aplikasi *Talent Pool* dalam rangka pembentukan *Assesment Center*)
5. Penyesuaian Manajemen Pengelolaan Kinerja Pegawai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Penerepan Aplikasi Kinerja BKN.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ada 7 point pada arah pembangunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) , yaitu :

1. Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
2. Sistem Kesehatan yang terintegrasi dan handal
3. Perlindungan sepanjang hayat dan adaptif
4. Dukungan sektoral untuk mendorong pertumbuhan (infrastruktur konektivitas, mobilitas dan produktivitas)
5. **Birokrasi yang profesional dan berintegrasi dengan penguatan SDM**
6. Reformasi penganggaran pusat dan daerah
7. Penguatan data (akurat, reliable dan terintegrasi)

Pada point ke 5 terkait Birokrasi yang professional dan berintegritasi dengan penguatan SDM selaras dengan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Sesuai dengan tugas dan

fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Lampung di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional.

Reformasi sumber daya aparatur memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (PNS) yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah. Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, permasalahan yang di hadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sedikit mengalami hambatan, maka alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik di lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu salah satunya ada adalah Profesionalisme ASN. Berikut review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.

Tabel 2 TC-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Kepegawaian Daerah	BKD	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	25%	Rp. 9.273.243.936	Program Kepegawaian Daerah	BKD	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	80%	Rp. 9.273.243.936
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp.14.092.122.960	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp.14.092.122.960

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga teknis yang di bidang kepegawaian, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan

Nasional

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan Negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan public, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam RPJMN 2019-2024 masih terdapat beberapa isu strategis selama lima tahun kedepan, antara lain :

1. Profesionalitas ASN

Menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum semua Provinsi dan Kabupaten / Kota menerapkan sistem merit, selanjutnya hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik . Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN , terutama luar jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu / fungsional belum berbasiskan sektor unggul kewilayahan. Selain itu masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian.

2. Aspek Kelembagaan dan Pelayanan Publik

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kelembagaan adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur dan Layanan. Selain itu, penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik (*e-service*) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (*maturity*) yang beragam.

Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui : penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan fungsional.
- b. Transformasi pelayanan publik melalui : pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik , penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Lampung di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di

bidang kepegawaian yang sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional. Dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 disusunlah strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 melalui Visi dan Misi Provinsi Lampung:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025			
MISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAH DAERAH YANG BERTATAKELOLA DAN BERORIENTASI KWIRAUSAHAAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Manajemen ASN	Terlaksananya Implementasi 8 aspek sistem merit	1. Perencanaan Kebutuhan	a. Perencanaan formasi dan pengadaan pegawai
			b. Harmonisasi pengajuan rencana kebutuhan formasi ke Kementerian PAN RB berbasis aplikasi
			a. Penyusunan pemetaan pegawai sesuai rencana kebutuhan pegawai untuk 5 (lima) tahun berdasarkan anjab dan ABK
			b. Penerimaan pegawai pindah mutasi dari instansi luar provinsi sesuai kebutuhan formasi yang kosong
			c. Penempatan PNS berdasarkan pemetaan kompetensi PNS sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah

VISI : LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025			
MISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAH DAERAH YANG BERTATAKELOLA DAN BERORIENTASI KWIRAUSAHAAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Pengembangan karier	a. Pengisian Jabatan administrator dan pengawas sesuai kompetensi
			b. Pelaksanaan uji kompetensi PNS dalam rangka penyusunan pemetaan kompetensi
			c. Fasilitasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar
			d. Data nominative PNS yang akan mengikuti diklat
		4. Promosi dan Mutasi	a. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui promosi terbuka
			b. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional tertentu
			c. Pengisian pejabat pelaksana berdasarkan kompetensi yang telah dilaksanakan
		5. Manajemen Kinerja	a. Pemanfaatan CAT-BKN dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian
		6. Penggajian penghargaan dan disiplin	a. Pembinaan PNS dalam rangka peningkatan kinerja individu dan organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan PNS
			b. Penjatuhan hukuman disiplin dan atau pemberhentian terhadap

VISI : LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025			
MISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAH DAERAH YANG BERTATAKELOLA DAN BERORIENTASI KWIRAUSAHAAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. Perlindungan dan pelayanan	PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
			a. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online sistem untuk percepatan processing data
			b. Penyediaan sarpras server dan infrastruktur penunjang pelayanan kepegawaian
			c. Penyediaan SDM penyelenggara IT bidang kepegawaian yang kompeten
			d. Pengembangan ruang layanan kepegawaian di BKD
		8. Sistem Informasi	a. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online sistem untuk percepatan processing data kinerja
			b. Pengembangan aplikasi data dan informasi kepegawaian terintegrasi dalam SIMPEDU BKD Provinsi Lampung
			c. Adopsi pengembangan aplikasi layanan kepegawaian oleh Kab/Kota
			d. Update dan validasi data secara berkala

VISI : LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025			
MISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAH DAERAH YANG BERTATAKELOLA DAN BERORIENTASI KWIRAUSAHAAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			e. Transaksi data kepegawaian melalui SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terintegrasi

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tahun 2023:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

Dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
 - ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

Berikut akan disajikan berbentuk tabel yaitu Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dan perkiraan Maju tahun 2024n, **(Tabel T-C.33, *terlampir*)**

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut disajikan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung fungsi penunjang kepegawaian :

Indikator Kinerja BKD Provinsi Lampung Berdasarkan Keputusan menteri dalam negeri No. 050-5889 Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Profesionalisme PNS	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	58%	79%	91%	100%

Sumber : Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung (2019-2024)

4.2 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Dana indikatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.28.867.163.951,- yang terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Sumber dana tersebut berasal dari dana APBD. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dana indikatif serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.313.393.842,- yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
2. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.553.770.109 ,- yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Perubahan Rencana Kerja BKD, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan RENJA Tahun 2024 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2022, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun

anggaran 2022 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan.

Semoga dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 seluruh Perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Lampung

Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana (APBD/APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Urusan Pendukung								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	15.773.062.751	APBD		100%	16.561.715.889
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	170.000.000	APBD		100%	178.500.000
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	13 dokumen	85.000.000	APBD		13 dokumen	89.250.000
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 laporan	85.000.000	APBD		9 laporan	89.250.000
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	13.302.632.987	APBD		100%	13.967.764.636
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	14 orang/bulan	13.267.632.987	APBD		14 orang/bulan	13.931.014.636
5.03.01.1.02.07	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKD PROVINSI LAMPUNG	24 laporan	35.000.000	APBD		24 laporan	36.750.000
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	906.077.309	APBD		100%	951.381.174
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	5.169.900	APBD		12paket	5.428.395
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	100.000.000	APBD		12paket	105.000.000
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	8.000.000	APBD		12paket	8.400.000
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	26.000.000	APBD		12paket	27.300.000
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	20.000.000	APBD		12paket	21.000.000
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	30Laporan	45.000.000	APBD		30Laporan	47.250.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	61Laporan	701.907.409	APBD		61Laporan	737.002.779
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	908.408.055	APBD		100%	953.828.458
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD PROVINSI LAMPUNG	12laporan	167.248.055	APBD		12laporan	175.610.458
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor	BKD PROVINSI LAMPUNG	12laporan	741.160.000	APBD		12laporan	778.218.000

	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	485.944.400	APBD		100%	510.241.620
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang diperlihara	BKD PROVINSI LAMPUNG	21unit	431.034.400	APBD		21unit	452.586.120
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	BKD PROVINSI LAMPUNG	46 unit	30.930.000	APBD		46 unit	32.476.500
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 unit	23.980.000	APBD		1 unit	25.179.000
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang ditingkatkan	BKD PROVINSI LAMPUNG	80%	2.496.600.000	APBD		80%	4.251.555.000
	PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	80%	949.600.000	APBD		80%	997.080.000
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 dokumen	430.000.000	APBD		9 dokumen	451.500.000
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKD PROVINSI LAMPUNG	615dokumen	44.600.000	APBD		615dokumen	46.830.000
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga profesi ASN yang di fasilitasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 lembaga	300.000.000	APBD		1 lembaga	315.000.000
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	185 dokumen	85.000.000	APBD		185 dokumen	89.250.000
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	15000 dokumen	90.000.000	APBD		15000 dokumen	94.500.000
	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional	BKD PROVINSI LAMPUNG	75%	525.000.000	APBD		75%	2.181.375.000
5.03.02.1.02.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	BKD PROVINSI LAMPUNG	595 orang	277.500.000	APBD		595 orang	291.375.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	BKD PROVINSI LAMPUNG	350 orang	1.725.000.000	APBD		350 orang	1.811.250.000
5.03.02.1.02.03	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	BKD PROVINSI LAMPUNG	200 dokumen	75.000.000	APBD		200 dokumen	78.750.000
	MUTASI DAN PROMOSI ASN	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	75%	881.000.000	APBD		75%	925.050.000
5.03.02.1.03.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	850 dokumen	51.000.000	APBD		850 dokumen	53.550.000
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	14 laporan	80.000.000	APBD		14 laporan	84.000.000
5.03.02.1.03.14	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengembangan promosi ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	10dokumen	750.000.000	APBD		10dokumen	787.500.000
	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	BKD PROVINSI LAMPUNG	75%	141.000.000	APBD		75%	148.050.000

5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 dokumen	90.000.000	APBD		12 dokumen	94.500.000
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	BKD PROVINSI LAMPUNG	15 orang	51.000.000	APBD		15 orang	53.550.000
JUMLAH					18.269.662.751				20.813.270.889

Bandar Lampung, Januari 2024

**Mengetahui,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah**



MEIRY HARIKA SARI, S.STP.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19770505 199712 2 001